

# KEPEMIMPINAN DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN GORONTALO

Walidun Husain

Dosen Universitas Negeri Gorontalo

## Abstract

*Kinds of this research is survey with qualitative approaching which have the nature of causal. The result shows that 1) participative leadership village head had positive influence, convince and together in education development, 2) the aspect of decision making in participative leadership of village head had positive influence and significant to development of education, 3) the aspect of human relations development in participative leadership had positive influence and significant to development of education, 4) the improvement of each member in participative leadership of village head had positive influence and significant to education development.*

**Keywords:** education and leadership

## I PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan di desa, Kepala desa senantiasa melakukan upaya untuk mengembangkan anggota kelompok atau masyarakat (*energizing*). Kepada warga yang menunjukkan kemampuan dan prestasi, Kepala desa memberikan dorongan dalam bentuk fasilitas untuk mengikuti pendidikan dan kursus keterampilan, serta mendorong pula agar prestasi tersebut dikembangkan secara terus menerus. Juga Kepala desa selalu memperhatikan keberadaan mereka dengan penuh perhatian yang bersifat manusiawi seperti memberikan surat keterangan tidak mampu kepada warga yang berkekurangan dalam melanjutkan, sehingga mendapat beasiswa atau pembebasan SPP di sekolah.

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Gorontalo khususnya pendidikan dasar telah berjalan, meskipun keberhasilan pencapaian program wajib belajar sembilan tahun belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD/MI) sudah di atas 100 persen, tetapi angka partisipasi murni (APM) SD/MI dan sekolah menengah pertama (SMP/MTS) baik angka partisipasi kasar (APK) maupun angka partisipasi murni (APM) masih di bawah jauh dari 95 persen, apalagi tingkat sekolah menengah atas dan madrasah aliah (SMA/MA), jauh di bawah 50 persen. Maknanya bahwa program wajib belajar 9 tahun belum tuntas, sebab indikator ketuntasan adalah 95 persen ke atas.

Demikian pula dengan buta aksara penduduk usia 10 - 44 masih masih di atas 5 persen,

yaitu, tahun pada tahun 2006 sejumlah 10.472 orang (7,2 persen), tahun 2007 sejumlah 10.272 orang (7 persen), dan pada tahun 2008 sejumlah 8991 orang (6,8 persen). Juga pada tahun 2008 angka putus sekolah usia 7 - 12 tahun sebesar 7.087 orang dari 60.802 orang, usia 13 - 15 tahun 6.811 orang dari 32.243 orang, dan usia 16 - 18 tahun 5.187 orang dari jumlah seluruhnya 24.907 orang. Lama studi yang ditempuh pada umumnya masih berada pada rata-rata kelas VI atau 6,5 tahun. Oleh karena itu agar permasalahan pembangunan pendidikan terutama dalam upaya menciptakan pemerataan pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dipaparkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Gorontalo memberdayakan semua pemangku kepentingan khususnya Kepala Desa untuk mengambil peran yang berarti dalam pembangunan pendidikan di desa. Agar Kepala Desa mempunyai aktivitasnya tidak saja pada pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB tetapi lebih fokus terhadap kegiatan pembangunan yang tengah digalakkan oleh pemerintah daerah.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo ini patut diterapkan mengingat pembangunan pendidikan di desa merupakan salah satu urusan wajib pemerintah dari 30 urusan pemerintahan yang diserahkan kabupaten/kota ke desa dan dalam pelaksanaannya harus dilaporkan oleh kepala desa baik dalam laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran, maupun LKPJ akhir masa jabatan kepala desa (Permendagri, Nomor 35 Tahun 2007).